

Gaji Dan Tunjangan Pns Dalam Uu Asn Remunerasi Pns

Getting the books **Gaji Dan Tunjangan Pns Dalam Uu Asn Remunerasi Pns** now is not type of challenging means. You could not solitary going like book collection or library or borrowing from your links to edit them. This is an entirely easy means to specifically acquire lead by on-line. This online revelation Gaji Dan Tunjangan Pns Dalam Uu Asn Remunerasi Pns can be one of the options to accompany you behind having further time.

It will not waste your time. agree to me, the e-book will definitely expose you other matter to read. Just invest little times to door this on-line proclamation **Gaji Dan Tunjangan Pns Dalam Uu Asn Remunerasi Pns** as capably as review them wherever you are now.

BALAK 6 & JERUJI BESI - 2020-12-02

Balak 6 merupakan permainan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Setiap daerah pasti sangat mengenal permainan balak 6. Di dalam masyarakat Riau sendiri, permainan Domino sangat digemari karena permainan balak 6 sangat menyenangkan. Meskipun begitu, sebagian masyarakat berpandangan negatif dengan permainan balak 6 karena dianggap hanya membuang-buang waktu dan selalu juga dihubungkan dengan perjudian, tetapi jika diteroka secara mendalam, dalam permainan balak 6 terkandung nilai-nilai yang tersirat, yakni kewaspadaan, kehati-hatian dan juga aturan-aturan permainan yang harus dipatuhi. Jika tidak hati-hati dalam melangkah, maka akan kalah dalam permainan. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, harus selalu waspada dan hati-hati. Terutama bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) haruslah hati-hati dan selalu taat pada aturan yang berlaku. Buku ini sangat menarik, karena penulis buku ini berhasil menyuguhkan nilai-nilai dan konsep moral di balik permainan domino. Di dalam buku ini juga dijelaskan secara terperinci dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW sebagai bentuk konsep moral yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan dan tata kelola ASN (Aparatur Sipil Negara) yang lebih baik. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembaca di tanah air.

Manajemen pendidikan : dilengkapi dengan analisis iklim organisasi, keterampilan manajerial dan kinerja sekolah ; Buku Penerbit Lovrinz - Hj. Ani Kuspini, SE., M.Si 2022-02-11

Definisi manajemen sangat luas, kata asalnya yakni to manage, yang berarti mengelola, memimpin atau mengarahkan. Dalam Bahasa Indonesia, manajemen bisa berarti sebuah usaha pengelolaan, pengendalian dan mengarahkan semua potensi yang ada demi mengejar sebuah tujuan yang diinginkan. Manajemen juga berarti proses pengkoordinasian serta upaya mengintegrasikan berbagai peran melalui berbagai aktivitas agar bejalan efektif dan efisien. ===== Penerbit Novel Lovrinz Penerbit Lovrinz, Novel Romantis, Novel Thriller, Novel Fantasy, Novel Cinta, Novel Family, Novel Horor, Novel Fiction, Novel Romance, Novel Religi, Novel Marriage, Novel Misteri, Novel Detective, Novel slice of live, Novel actions, Novel fun fiction, Novel historical, Novel Education, Novel Story, Buku fiksi, Buku Ilmiah, Buku cerita, Buku cerita Anak, Buku Motivasi, ebook novel lovrinz

Perlindungan Aparatur Sipil Negara Mewujudkan Kesejahteraan - Satia Supardy 2023-02-13

Buku yang berjudul PERLINDUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN terdiri dari empat bab yaitu Bab I Pendahuluan membahas Peran ASN, Integritas ASN dan Core Value BerAKHLAK ASN, Bab II Kompensasi ASN membahas Makna, Lingkup dan Faktor-Faktor ASN, Bab III Perlindungan ASN membahas Jaminan Hari Tua, Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum, dan Bab IV Kesejahteraan ASN membahas Penggajian ASN, Bentuk Penghargaan dan Cuti ASN. Sangat penting memiliki buku ini dan membacanya secara konseptual khususnya para pengelola kepegawaian ASN dapat mengaplikasikan dalam meningkatkan kinerja individu dan organisasi serta menyejahterakan keluarganya, Aamiin. Buku Perlindungan Aparatur Sipil Negara Mewujudkan Kesejahteraan dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung kegiatan Pelatihan

Manajemen ASN. Tentunya buku ini bukan saja diperuntukkan bagi ASN tetapi bagi siapa saja yang haus tentang wawasan kepegawaian penting perlu dimiliki.

Dinamika Norma Hukum Aparatur Sipil Negara - Damera Press - Dr. Tanti Kirana Utami, S.H., M.H. 2022-09-11

Pada era reformasi, upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang pemerintahan telah terjadi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik (democratic and good governance). Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi itu adalah penataan aparatur pemerintah.

Hakikat Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah - Dr. H.A. SYAMSUL MULHAYAT, SH, MH., Penerbit Adab

Judul : Hakikat Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis : Dr. H.A. SYAMSUL MULHAYAT, SH, MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 296 Halaman ISBN : 978-623-497-434-8 SINOPSIS Selaku Aparat Sipil Negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan pemberian pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan kedisiplinan nasional dilingkungan Aparatur Sipil Negara yaitu PNS. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai negeri sipil, pemerintah telah membuat suatu regulasi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada paragraf 11 pasal 86 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara. Tetapi pada umumnya PNS dirasakan masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan diperkirakan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Oleh karenanya penegakan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) kini sudah sepatutnya mendapat perhatian yang lebih serius!

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru - Tim Visi Yustisia 2015-11-01

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN,

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

Reformasi Birokrasi - Indonesia dan Revolusi Industri 4.0 - DR. Riris Katharina 2021-12-01
Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengakomodasi dukungan terhadap penerapan e-government yang sudah dilaksanakan oleh Negara-negara maju. Problem yang sampai saat ini masih dirasakan dalam menjalankan reformasi birokrasi yaitu implementasi system merit. Agar system merit dapat dijalankan secara konsekuen, dua hal perlu dibenahi, yaitu pendekatan kekuasaan pejabat dan tata hubungan pejabat politik dan pejabat birokrat. Jika manajemen kekuasaan dan hubungan kedua jabatan itu tidak dibenahi dan ditata dengan baik maka meritokrasi dan syarat system merit seperti kompetensi calon yang benar-benar kompeten dan netralitas pejabat yang benar-benar netral amat sulit diwujudkan, dan perbaikan dan pertumbuhan reformasi menghadapi Revolusi Industri 4.0 akan mengalami kesulitan. Buku ini merekomendasikan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sangat penting untuk segera dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan yang terjadi akibat Revolusi Industri 4.0.

Legislative Drafting - Badriyah Khaleed, S.H 2018-01-01

Bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk? Apakah peraturan sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas? Apakah sudah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan? Masyarakat harus mengeni betul bagaimana pembentukan peraturan perundang—undangan yang nantinya diberlakukan serta sejauh mana hak dan kewajiban masyarakat yang diatur dalam sebuah peraturan. Buku ini memuat teknis penyusunan berbagai peraturan (Undang—Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota), mulai dari proses perencanaan sampai pengundangan, tanpa melupakan dasar teori dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini semakin lengkap karena disertai contoh DIM RUU, naskah akademik, sena saiinan RUU. Kebutuhan terhadap buku acuan penyusunan peraturan perundang-undang tetap penting. Misalnya, bagi pemerintah daerah hingga pusat sebagai lembaga yang bertugas merancang peraturan (Legislator); bagi mahasiswa hukum dalam mata kuliah dasar Hukum Tata Negara; bagi praktisi hukum; bagi LSM; maupun masyarakat luas yang memiliki kepentingan terhadap seluk-beluk pembentukan peraturan perundang-undangan. Buku persembahkan penerbit MediaPressindoGroup

MPOT - Syahron Al Rosyid, dkk. 2022-01-10

Kumpulan artikel ini mencakup semua analisis tentang kesumberdayaan manusia. Secara garis besar, cakupan materi dalam buku ini meliputi pengaruh kompetensi kinerja karyawan, implementasi pengendalian, penilaian kerja, peran sumber daya manusia, pelatihan, pengaruh kepemimpinan, manajemen sumber daya, pengaruh gaya kepemimpinan, kompetensi, pengendalian, tantangan desain data center, strategi peningkatan SDM, serta pengaruh reward dan punishment.

Kebijakan Publik dalam Pusaran Perubahan Ideologi dari Kuasa Negara ke Dominasi Pasar - Wahyudi Kumorotomo 2020-09-30

Perubahan dari masa Orde Baru menuju Reformasi, turut membentuk pengaturan ulang bagi berjalannya akumulasi kapital dan relasi kekuasaan negara. Pada masa Orde Baru kekuasaan berjalan secara terpusat. Kebijakan publik menjadi kewenangan tunggal dari pemerintah di bawah kendali rezim otoriter Soeharto. Walaupun liberalisasi pasar telah dibuka di pertengahan 1980-an, tetapi kepentingan akumulasi kapital harus bernegosiasi dengan rezim penguasa agar mendapatkan konsesi. Sementara kuasa pendisiplinan oleh negara menjadi peranti agar rakyat menuruti kehendak penguasa. Proses demokrasi dikekang dengan dalih stabilitas dan pembangunan ekonomi nasional. Gerakan rakyat didepolitikasi dengan kebijakan massa

mengambang (floating mass). Namun, pada perkembangannya, perlawanan terhadap kuasa negara-kapitalistik versi Orde Baru tetap bermekaran. Pada tahun 1998, kuasa negara yang telah dibangun dan dipertahankan selama lebih dari 32 tahun pada akhirnya runtuh oleh angin perubahan. Krisis ekonomi, gerakan rakyat, dan perpecahan di kelas elite menjadi pemantik jatuhnya rezim Soeharto. Seperti bunga di musim semi, cita-cita perubahan tumbuh bermekaran menghiasi era baru yang disebut “Reformasi”. Proses demokratisasi secara politik mulai terjadi. Akan tetapi bunga-bunga yang mekar itu mulai layu ketika ketimpangan ekonomi justru semakin melebar, ekonomi nasional terkoyak, dan pemaksaan “pembangunan” untuk tujuan akumulasi kapital telah mengorbankan rakyat kecil. Dapat dibilang, setelah terjerat oleh kuasa negara, Indonesia kini terkurung dalam rezim dominasi pasar. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini mengulas tentang kebijakan publik di Indonesia yang berada dalam pusaran perubahan ideologi dari kuasa negara ke dominasi pasar. Perubahan rezim dan relasi kuasa, turut mengubah proses pengaturan yang dilakukan oleh negara, kekuatan bisnis, dan gerakan rakyat. Buku ini dengan pendekatan studi kritis, analisis historis dan komparatif menyediakan analisis tajam terhadap kondisi ekonomi politik Indonesia pasca 20 tahun Reformasi. Buku ini menunjukkan bahwa di tengah keruwetan politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Indonesia, selalu ada alternatif lain untuk membawa perubahan ke arah keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi sebagian besar rakyat.

Menjadi ASN ber-Karakter dalam Bingkai ANEKA - Yanto Suharto 2022-01-05

Buku ini ditulis sebagai media berbagi penulis atas dasar pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebagai widyaiswara dalam memfasilitasi latihan dasar untuk CPNS. Buku ini dapat menjadi bahan bacaan pendamping yang membantu pembaca dari kalangan umum maupun CPNS dalam memahami nilai dasar ASN yang menjadi salahsatu pola dalam pembentukan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian SMK/MAK Kelas XI - Dra. Eny Pujiastri, M.M. dan Sri Edi Budiningsih, S.Pd. 2021-01-14

Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan Permendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar.

Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing. *Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian Manajemen Perkantoran. Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (edisi revisi).* - Drs. Joko Pramono 2021-04-20

Buku yang berjudul Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (C3). Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia Kepegawaian. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Administrasi Kepegawaian • Regulasi Kepegawaian • Sistem Administrasi Kepegawaian • Perencanaan Kebutuhan Pegawai • Sumpah/Janji Pegawai • Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai • Perencanaan Karir Pegawai • Penilaian Kinerja Pegawai •

Penggajian dan Tunjangan Pegawai Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda dan esai. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang bisnis dan manajemen. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.

Coaching For Millennial Leaders - I Dewa Gede Soni Aryawan ATD, M.EngSc; Dr. Susy Setiawati, M.Pd. 2021-10-29

Penulisan buku ini didorong oleh kebutuhan terhadap peningkatan mutu 'Coaching dari seorang Coach' yang akan membantu seseorang untuk proses menemukan dan bertindak berdasarkan solusi yang paling cocok dengan dirinya, dari posisi dimana dia sekarang, dengan menggali sumber daya apa saja yang dibutuhkan, sikap mental yang harus dibangun, dan teknik-teknik yang cocok dalam mengimplementasikannya dengan mengajukan pertanyaan yang tepat sehingga 'coachee' akan menemukan jawaban dengan sendirinya. Demikian pentingnya peran Coach dalam peningkatan kinerja individu maupun kinerja organisasi dan Kinerja Organisasi Pemerintah. Pelatihan Pemimpin perubahan bagi aparat Pemerintah yang dimaksud adalah pemimpin yang mampu mengarahkan pengembangan pribadi dan profesional, meningkatkan produktivitas, kinerja, motivasi, dan membantu menciptakan keseimbangan kehidupan dan kerja. Tuntutan Coaching aparatur pemerintah seperti tersebut, maka perlu dibuat terobosan baru dalam hal, penerapan sistem pelatihan baru dengan model Coaching. Buku ini disusun untuk membantu para Coach dalam memberikan Coaching bagi Inovator pemerintahan (peserta pelatihan Kepemimpinan Perubahan) dalam mendiagnosa organisasi, dengan membuat terobosan yang inovatif dalam meningkatkan kinerja. Sejalan dengan fungsi Coaching yang merupakan proses untuk membantu seseorang atau organisasi dalam menggabungkan keterampilan dengan pemahaman mendalam tentang dinamika proses kerja dan budaya organisasi untuk mendorong para inovator berkreasi kearah yang lebih baik, agar tumbuh semangat dari para ASN untuk menciptakan inovasi baru dalam pelayanan publik.

MANAJEMEN ASN DALAM BINGKAI REGULASI - Bramantyo Tri Asmoro, S.Hub.Int., M.PSDM 2022-02-03

Buku ini dipersiapkan untuk mahasiswa yang sedang mempelajari tentang Manajemen ASN. Buku ini terdiri dari 8 Bab yang berisi tahapan-tahapan dalam Manajemen ASN, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara - Anwar, S.Sos., M.A.P 2021-09-15

Adapun tujuan dari Buku ini adalah untuk memberi wawasan yang lebih baik bagi setiap pembacanya terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Supaya lebih mengerti tentang Hukum Administrasi Negara terutama dalam hal konseptual dan teori yang dipaparkan dalam pembelajaran mata Hukum Administrasi Negara.

Pergolakan Pemikiran Reformasi Birokrasi - Rahmad Daulay, S.T. 2021-01-01

Pembangunan birokrasi yang reformis menjadi isu utama dan tujuan penyusunan buku ini. Kegelisahan yang muncul akibat banyaknya penyimpangan yang terjadi di pemerintahan membuat penulis merasa terpanggil hati nuraninya untuk berpikir dan menganalisa situasi kondisi yang ada dan melahirkan solusi dan pemecahan masalah menuju perbaikan berkelanjutan. Tidak bisa dipungkiri bahwa regulasi justru ikut menjadi sumber masalah. Ketika regulasi diterapkan melahirkan tambahan masalah. Masalah ini dibedah secara praktis dan empiris sehingga solusi yang ditawarkan pun sangat praktis dan empiris juga. Buku ini akan menjadi panduan praktis bagi para birokrat yang berkecimpung di pemerintahan pusat, daerah dan desa. Sifat praktis dan aplikatif menjadi unsur utama dalam materi buku ini. Oleh karena itu

penerapannya bisa dilakukan oleh birokrasi di semua tingkatan.

Riak-Riak Otonomi Daerah Di Indonesia Kurun Waktu 2010-2021 - Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si. 2021-10-01

Buku ini adalah buku referensi akademik yang bersifat populer dan dibiarkan langsung mengupas gejala empirik otonomi daerah yang menjadi sorotan dibuka dari awal sampai viii akhir Bab. Desentralisasi dan pembangunan menjadi bab pembuka dari buku ini. Keterkaitan dua kata tersebut coba diujikan dalam praktik di Indonesia dengan isu kekiniannya. Selanjutnya dipaparkan mengenai isu-isu strategis hubungan pusat dan daerah, otonomi Yogyakarta, otonomi Papua, soal kedudukan gubernur, kedudukan wakil kepala daerah dan beberapa isu menarik lainnya. Riak-Riak Otonomi Daerah Di Indonesia Kurun Waktu 2010-2021 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Pengembangan Karier dan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara - Dr. PADMANINGRUM, S.H., MPd. 2021-09-23

ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam buku ini yang dimaksud ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi di dalam mengembangkan karier aparatur sipil negara (ASN) dan disiplin kerja ASN. Buku ini menguraikan tentang kedudukan pejabat negara menurut manajemen kepegawaian, manajemen ASN, pengembangan karier ASN dan Disiplin Kerja ASN.

ASN Berakhlak Bangsa Melayani Bangsa - Edi Abdullah, S.H., M.H. 2021-10-01

Buku Sosiologi dan Antropologi yang berjudul ASN Berakhlak Bangsa Melayani Bangsa merupakan buku karya Edi Abdullah. Buku ini akan menjadi core values bagi ASN untuk dijadikan pedoman dan menjadi standardisasi bagi semua aparatur sipil di negara ini untuk dijadikan panduan nilai dan budaya kerja dalam organisasinya, yang dikenal dengan sebutan Berakhlak Bangsa Melayani. Buku ASN Berakhlak Bangsa Melayani Bangsa ini membahas mengenai bagaimana jalan menuju ASN berakhlak yang merupakan penjabaran nilai dari 7 core values dari kumpulan Nilai-Nilai Dasar Instansi Pemerintah, yang terdiri dari 7 nilai yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Buku ini juga membahas tentang kewajiban dan larangan ASN sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Daftar isi buku ini meliputi : Bab I Aparatur Sipil Negara Bab II Asas, Prinsip, Kode Etik, Nilai Dasar Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen PNS Bab III Hak, Kewajiban, Dan Larangan ASN Bab IV Jenis Jabatan Dalam Profesi ASN Bab V Kompetensi yang Harus Dimiliki ASN Bab VI ASN Berakhlak Bab VII Bangsa Melayani Bangsa Bab VIII Motivasi ASN Berakhlak Part 1 Bab IX Motivasi ASN Berakhlak Part 2 Spesifikasi Buku : Kategori : Sosiologi dan Antropologi Penulis : Edi Abdullah E-ISBN : 978-623-02-5485-7 Ukuran : 14x20 cm Halaman : 240 hlm Tahun Terbit : 2022 Penerbit Deepublish adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). Buku ini tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish : penerbitbukudeepublish.com

Kompilasi Opini Di Media Masa - Dr. Purwoko, S.E., M.M. 2020-10-01

Kompilasi Opini di Media Masa ini merupakan kompilasi ide dalam bentuk tulisan opini, yang menganalisa suatu fenomena aktual dengan kemas bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh pembaca. Opini pada buku ini merupakan kajian dengan tema pokok ekonomi, namun ada sedikit tulisan yang terkait dengan pendidikan dan kehidupan sosial. Dengan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit diharapkan Buku tentang Kompilasi Opini di Media Masa ini dapat memberikan informasi dan inspirasi tentang berbagai hal terkait kondisi saat tulisan

dibuat. Kompilasi Opini Di Media Masa ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

ASN ??! Netralitas ASN dalam Pemilu - Dr. Sarjiyati, S.H., M.H. 2021-11-01

Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Asas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum ansich (pro justitia) tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Jika pelanggaran ASN tidak berkaitan dengan ketentuan undang-undang pemilu/pilkada maka Bawaslu dapat merekomendasikan pelanggaran peraturan perundangan lainnya. ASN ??! Netralitas ASN dalam Pemilu ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Tim Jogja Bangkit 2014-01-01

Banyak kasus ketimpangan sosial dialami oleh para tenaga kerja Indonesia. Sebut saja, tenaga kerja yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang marak akan praktik korupsi. Bahkan, proses rekrutment para PNS dan pegawai honorer ini kental akan aroma nepotisme. Sayangnya, hal ini diperparah dengan buruknya kualitas pelayanan kepada publik. Sebaliknya, jika diperbandingkan dengan nasib para tenaga kerja di luar pemerintahan. Mulai dari tenaga kerja di luar negeri yang menjadi korban penganiayaan dan kurang mendapat perlindungan, perlakuan diskriminasi (tidak adil) antara pekerja/buruh dengan pengusaha, sistem praktik kerja outsourcing yang menyengsarakan, dan masalah lainnya yang kerap terjadi pada tenaga kerja Indonesia. Awal tahun 2014, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ini bertujuan menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan, kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat menjadi problem solving atas semua permasalahan di bidang ketenagakerjaan tersebut. Bahkan, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tenaga kerja Indonesia semakin dijamin kesejahteraannya. Buku ini menjawab semua kebutuhan hak dan kewajiban para aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah), dan tenaga kerja Indonesia secara umum. Temukan juga informasi mengenai seluk beluk tentang BPJS. Dilengkapi dengan bonus CD berisi peraturan pemerintah dan peraturan menteri terbaru, buku Undang-Undang ini semakin komplit dan dapat menjadi acuan bagi para aparatur negeri sipil, tenaga kerja secara umum, maupun pengusaha. Semoga buku ini bermanfaat. Selamat membaca! Buku terbitan GalangPress (Galangpress Group).

Etika Pemerintahan - Dr. Drs. ISMAIL NURDIN, M.Si

Pasca-Reformasi 1998, Indonesia menghadapi situasi dilematis. Demokratisasi membuka luas keran bagi setiap orang, termasuk para penyelenggara negara, untuk berekspresi dan mengaktualisasikan diri di ruang publik. Rekrutmen jabatan publik terbuka untuk umum. Struktur dan pola penyelenggaraan pemerintahan yang semula tertutup dan didominasi oleh birokrasi telah diubah. Publik diberi akses seluas-luasnya. Akhirnya, hubungan kelembagaan antara birokrasi dan non-birokrasi kian cair dan fleksibel. Akan tetapi, perubahan di atas seringkali memunculkan ekspresi yang berseberangan dengan tata berperilaku yang mengakar

kepada nilai dan norma sosial, agama, dan hukum. Maka muncullah fenomena-fenomena baru berupa perilaku, tindakan, dan bahkan kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan standar etika bangsa Indonesia. Di sisi lain, tuntutan publik terhadap tampilan pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan yang beretika dan melayani semakin tinggi. Karenanya pemahaman tata kelola pemerintahan yang beretika menjadi keniscayaan. Institusi pemerintahan dengan berbagai kelembagaannya yang diselenggarakan para praktisi pemerintahan termasuk aparatur sipil negara perlu memahami konsep, norma, dan praktek etika pemerintahan. Buku ini menjadi panduan bagi penyelenggara pemerintahan serta menjadi kajian bagi pembelajar pemerintahan khususnya mahasiswa yang menekuni kajian pemerintahan dan yang akan menjadi praktisi pemerintahan. Buku ini membahas konsep etika pemerintahan, moralitas, sumber etika, azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kekuasaan dan demokratisasi, kode etik pembinaan etika aparatur sipil negara, serta etika pelayanan pemerintahan. Mengulas tema sentral etika pemerintahan dengan cara yang mudah difahami, buku ini sangat direkomendasikan sebagai bahan bacaan bagi para akademisi seperti dosen, peneliti dan mahasiswa, juga kalangan penyelenggara negara baik di jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan khalayak umum. []

Manajemen Pelayanan Publik - Hayat 2017-01-01

Alhamdulillahilabbilamin. Puji syukur kepada Allah Swt., atas segala nikmat, karunia dan inayah-Nya buku ini penulis berhasil susun. Buku "Manajemen Pelayanan Publik" menjadi penting untuk dipelajari dan dikembangkan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Baik dalam ranah akademisi maupun praktisi. Hal ini mengingat, bahwa kebutuhan akan pelayanan publik yang baik, berkualitas dan sesuai dengan kepentingan masyarakat sangat diharapkan, terutama pada pelayanan dasar. Pelayanan publik tidak hanya berbicara dalam aspek teknis, tetapi formulasi atau konsepsi dasar, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan penting untuk diaktualisasikan bagi aparatur negara.

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - dr. Ratih Wulandari, M.H 2020-05-12

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dalam setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional menerangkan bahwa pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu penge- tahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya, yang dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sistem Kesehatan Nasional/ SKN memberikan fokus penting pada pengembangan dan pember- dayaan sumber daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Salah satu sub sistem dari Sistem Kesehatan Nasional/SKN, adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan berperan sebagai pelaksana dari upaya kesehatan dimana secara kuantitas/jumlah dan kualitas/ profesionalisme dan kompetensi perlu mendapatkan perhatian dalam pemenuhan dan ketercukupan distribusi secara adil dan merata, sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua) - Sri Hartini, S.H., M.H. 2022-08-18
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami serta dapat mengkonstruksikan objek hukum kepegawaian dimulai dari Format Lembaga Kepegawaian Di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; Etika PNS; Netralitas PNS; Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai di daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur Penjatuhan disiplin PNS; dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Kepegawaian Indonesia. Harapannya, buku ini akan menjadi referensi dalam penerapan manajemen kepegawaian di Indonesia. Buku ini merupakan buku teks mata kuliah Hukum Kepegawaian Sasaran dari buku ini adalah mahasiswa hukum maupun administrasi negara, pegawai Aparatur Sipil Negara serta pemerhati hukum kepegawaian di Indonesia

Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3 - Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. 2017-08-14

Buku sederhana ini sangat menarik karena dikemas dan disusun oleh seorang yang berprofesi sebagai hakim dan dosen. Bahkan, Penulis sudah terbiasa menulis secara teratur dan berkesinambungan di berbagai media cetak. Berbagai kritik positif untuk membangun penegakan hukum di Indonesia dikupasnya satu per satu berdasarkan refleksi dan pengalamannya selama 32 tahun sebagai seorang hakim di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan dosen di berbagai perguruan tinggi swasta di Indonesia dengan argumentasi logika hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam buku ini, Penulis telah membahas di antaranya: ? Polemik profesi hakim sebagai pejabat negara ? Polemik pembagian kekuasaan kehakiman ? Masalah putusan pengadilan tanpa perintah penahanan terdakwa ? Dilema penurunan usia para hakim ? Lembaga Negara dalam menjalankan tugasnya wajib dilindungi hukum Dan masih banyak masalah dalam penegakan hukum di Indonesia yang dibahas dan menjadi perhatian serius Penulis, seperti perjalanan Komisi Yudisial (KY) agar tetap konsisten dan mampu mengejawantahkan tujuan ideal KY sebagai [lembaga etik pengawasan hakim dan menjaga harkat/martabat hakim] seperti diatur dalam UU No. 18/2011 tentang KY dan Konstitusi UUD 1945; Kasus korupsi terkait pemidanaan [diskresi] yang tidak boleh sembarangan dipidanakan oleh aparat penegak hukum; Mandulnya penegakan hukum atas dihentikannya penuntutan Kasus Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Kejaksaan Agung; dan masih banyak kasus yang dipolitisasi, seperti penangkapan dan penahanan seorang tersangka sering dipaksakan untuk pemenuhan kebutuhan hukum sesaat yang semuanya itu berpotensi menyebabkan penegakan hukum di Indonesia mengalami degradasi dan krisis. Yang lebih menarik lagi, ada kupasan bagaimana menciptakan Keluarga Bahagia. Mengapa? Karena [Keluarga merupakan istana/ tempat persekutuan keluarga sebagai kader-kader bangsa yang berkualitas. Dalam praktik begitu banyak rumah tangga [bubar] atau bercerai karena kerap terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang tak kalah pentingnya, dalam buku ini dapat diketahui secara jelas Siapa Dia Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. hakim multitalenta, yang pernah mengadili [kopi maut bersianida] ketika sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus.***

DPR dan Defisit Demokrasi - Poltak Partogi Nainggolan 2022-04-30

DPR dan Defisit Demokrasi adalah memori kolektif bangsa dan negeri. Kedua penulisnya bukan orang yang punya kuasa dan hidup bergelimpang kekuasaan dan materi, melainkan hanya bagian dari saksi sejarah yang masih selalu berusaha mempertahankan idealisme. Pandangan di buku ini adalah cermin untuk melakukan evaluasi perjalanan demokrasi Indonesia di era baru yang diklaim sebagai 'era reformasi', yang penuh kegalauan bagi anak bangsa yang menyadarinya. Melaporkan keadaan negeri dan penghuninya ke luar gedung dengan apa yang penulis lihat dan alami sehari-hari di pusat kekuasaan politik nasional, bukanlah sebuah kesalahan, khususnya membahas kinerja parlemen yang longgar akuntabilitas dan parameter capaian kerjanya. Kedua penulis menuangkannya dalam buku ini sebagai warisan berharga bagi

bangsa ini. Harapannya adalah, buku menjadi modal bagi generasi baru untuk terus terpanggil membongkar dan memperbaiki praktik politik yang buruk, agar defisit demokrasi tidak berkelanjutan, sehingga konsolidasi demokratis hanya tinggal impian. Karya ini adalah bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai, sebagai bagian dari refleksi pemikiran dan analisis yang berlanjut, dari kedua penulis sebagai periset/peneliti yang mendalami isu strategis mengenai parlemen dan tata kelola negara dalam rezim demokratis. Kedua penulis berusaha melanjutkan tradisi intelektual masyarakat beradab ini, sebelum memulai aktivitasnya dengan status yang baru sebagai peneliti di institusi pemerintah, karena melanjutkan aktivitas yang sama atas nama institusi parlemen, kini dilarang. Tidak ada negeri di dunia ini, selain Indonesia, yang melarang keberadaan institusi riset dan aktivitasnya di parlemen, selain yang dimiliki pemerintah. Menuliskan memburuknya parlemen dan hancurnya institusi risetnya, dan defisit demokrasi yang dihasilkannya adalah bagian dari tugas melengkapi collective memory bangsa ini agar tidak ada yang terputus, tercecer dan hilang,

Pengembangan Model Sistem Informasi Administrasi Presensi Dalam Membangun Karakter ASN Berbasis Kinerja - Imas Sumiati 2022-12-01

Pelayanan Publik - Muhammad Fitri Rahmadana 2020-10-06

Layanan publik bagi pemerintah sudah selayaknya dipersepsikan sebagai sebuah layanan komersial meskipun tidak bertujuan komersial. Artinya jika dipersepsikan sebagai sebuah layanan komersial oleh pemerintah maka pemerintahlah yang memiliki kepentingan terhadap masyarakat bukan sebaliknya. Hal yang terjadi selama ini adalah masyarakat yang seakan-akan membutuhkan layanan publik sehingga kualitas layanannya dapat dikatakan seadanya, namun jika dipersepsikan sebaliknya maka pemerintahlah yang membutuhkan masyarakat sehingga pemerintah akan berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Untuk membahas konsep dan implementasi terkait pelayanan publik secara komprehensif maka buku ini disusun menjadi 15 bab yaitu: Konsep Kinerja Pelayanan Publik Model Pelayanan Publik Standar Pelayanan Publik Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Sumber Daya Aparatur Pelayanan Publik Kondisi Pelayanan Publik di Indonesia Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Ciri-Ciri Pelayanan Birokrasi Yang Berkualitas Kebijakan Publik dan Efektivitas Pelayanan Publik Transparansi Pelayanan Publik Good Governance dalam Pelayanan Publik Integrasi Integritas Dalam Pelayanan Publik Pelayanan Publik di Era Digital Kontrol Sosial Pelayanan Publik

Hukum Administrasi Negara Sektoral - Harsanto Nursadi

Buku Hukum Administrasi Negara (HAN) Sektoral bertujuan guna memenuhi kebutuhan perkuliahan mata kuliah Hukum Administrasi Negara Sektoral di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara - Tim Viva Justicia

Puji Syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini sehingga buku ini bisa terselesaikan dengan lancar. Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini dibuat bertujuan untuk menumbuhkan iklim kerja yang profesional kepada para aparatur sipil negara. Sehingga para pegawai ASN bisa bekerja dengan maksimal, tanpa ada intervensi, bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan menjalankan fungsi pelayanan kepada publik secara baik dan maksimal. Buku Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) berisi pasal demi pasal yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, mulai dari asas, prinsip dasar, kode etik, kode perilaku, kedudukan, status, dan masih banyak lainnya. Di dalam buku ini juga dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, buku ini berisi tentang aturan-aturan serta manajemen Aparatur Sipil Negara sehingga bisa menjalankan fungsi dan peran untuk melayani publik dengan baik dan maksimal.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara - Tim BIP 2017-04-03

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur sipil negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Sebagai salah satu komponen terpenting, profesionalisme ASN sering kali dipertanyakan. ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Walaupun reformasi Indonesia sudah berjalan, namun masih ada kendala lain yang harus dihadapi, antara lain: struktur organisasi yang kurang proporsional karena kelembagaan pemerintah belum sepenuhnya berprinsip pada organisasi yang efisien dan rasional, rendahnya tingkat responsibilitas di lingkungan instansi pemerintah dalam mengembangkan tugas dan amanahnya, praktik KKN belum sepenuhnya teratasi, pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat, terabaikannya nilai etika dan budaya kerja serta sistem dan prosedur kerja yang kurang efektif dan efisien di lingkungan instansi pemerintah. Dan, juga karena image yang tercipta dari ASN terlanjur buruk. ASN diharapkan mampu untuk bekerja secara optimal sesuai dengan tugas yang telah di amanahkan, namun masih banyaknya permasalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah sehingga perlu adanya reformasi atau perubahan peraturan yang tegas untuk menindak lanjut permasalahan tersebut, contohnya adalah masalah kedisiplinan dalam bekerja. Untuk itu kami menyusun antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah agar mudah dipahami dan disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia.

Ringkasan Teori-Teori Dasar Pembelajaran - Ferry Wibowo, S.Pd

Ringkasan Teori-Teori Dasar Pembelajaran Penulis : Ferry Wibowo, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCCB : 62-39-4013-5 Terbit : April 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Sebagai pengajar atau calon pengajar hendaknya memahami hakikat bahwa belajar adalah aktifitas sepanjang hayat. Belajar akan selalu dilakukan manusia semenjak lahir ke dunia sampai akhir hayatnya. Proses belajar sangatlah kompleks, bukan hanya sekedar mendikte buku atau menuliskan isi buku dipapan tulis, namun terdapat banyak sekali instrumen yang harus disiapkan oleh pengajar untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada peserta didiknya agar makna belajar tersebut memiliki tujuan dan hasil yang nyata pada perubahan sikap maupun perilaku yang konstan untuk objek belajarnya, yakni peserta didik itu sendiri. Paradigma konvensional dikalangan pengajar yang masih menerapkan pakem lama tentu berpengaruh pada proses belajar tersebut sehingga tujuan belajar yang mengacu pada proses belajar abad 21 menjadi tersendat. Bertemali dengan hal tersebut, buku Ringkasan Teori-Teori Dasar Pembelajaran disusun dengan berisikan sejumlah teori-teori pendukung dari berbagai tokoh yang masyhur untuk mempersiapkan rencana dan pelaksanaan pembelajaran yang diharapkan bisa membangun pemahaman baru dan sudut pandang konkret pada proses belajar yang terstruktur dan tepat sasaran. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia Edisi Kedua - Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA
2016-03-01

Substansi utama isi buku ini antara lain memuat uraian permasalahan kepegawaian sipil di Indonesia, mulai dari sistem lama (terdahulu) hingga ke sistem yang terbaru—undang-undang kepegawaian sipil—yang mulai diberlakukan, perubahan paradigma pemerintahan, manajemen kepegawaian pemerintah, masalah kebijakan dan peraturan tentang pegawai negeri sipil, penataan birokrasi, dan proses manajemen kepegawaian sipil, serta alternatif solusi persoalan

yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian sipil di Indonesia. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA - Dr. Mhd Taufiqurrahman S.H., M.H.
2022-02-14

Pembahasan hukum administrasi negara dalam buku ini telah disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan berbagai aturan (regulasi) yang berkaitan dengan lapangann hukum administrasi negara.

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Guru - Suparman, S.Pd.I, S.Pd.

Dalam lingkungan sekolah, Kepala Sekolah adalah pemimpin yang memegang tongkat kepemimpinan menggerakkan pada guru dan staf kependidikan untuk bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan sekolah. Dengan pola kepemimpinan yang baik dan tepat diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas para guru, sehingga akan mencapai prestasi sebagai guru profesional.

Pengantar Pemerintahan Daerah - Ani Sri Rahayu 2022-02-18

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU RI No. 9 Tahun 2015 jo. UU RI No. 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi buku ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru, yakni UU RI No. 9 Tahun 2015 jo. UU RI No. 23 Tahun 2014. Selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Kajian pokok buku ini, meliputi: 1. Pengantar Pemerintahan Daerah. 2. Pembentukan Daerah, Kawasan Khusus dan Perbatasan. 3. Pembagian Urusan Pemerintahan. 4. Penyelenggaraan Pemerintahan. 5. Sistem Pemilihan Kepala dan wakil Kepala Daerah. 6. Kedudukan, tungsi, Tugas dan wewenang DPRD. 7. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 8. Kepegawaian Daerah, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Sipil Daerah/Kab/Kota. 9. Prinsip Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah. 10. Perencanaan Pembangunan Daerah. 11. Pembentukan Kawasan Perkotaan. 12. Pemerintahan Desa. 13. Kerja Sama Daerah dan Perselisihan. 14. Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Buku ini layak dijadikan referensi bagi pejabat negara, politisi partai, anggota dewan, akademisi, mahasiswa, dan semua warga negara. Tujuan dihidirkannya buku ini guna mematangkan wawasan kita dalam memahami Pemerintahan Daerah baik secara teori, hukum, dan Aplikasinya.

100% Lulus Tes CPNS HK2 & Seleksi PPPK - Dwi Sunar Prasetyono

Tentunya, setiap orang menginginkan hidup lebih sejahtera. Ada banyak hal yang dilakukan untuk mencapainya. Misalnya dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apakah Anda salah satunya? Nah, buku inilah yang Anda butuhkan. Buku ini menyajikan materi dan kisi-kisi soal tes CPNS HK2 dan tenaga PPPK yang meliputi materi soal tipe A, B, dan C. Selain itu, buku ini juga memuat beberapa materi soal tes kemampuan bidang yang meliputi tenaga medis dan kesehatan, tenaga pengajar, serta penyuluh pertanian yang spesifik untuk kebutuhan tenaga HK2 dan PPPK. Tidak ketinggalan, kunci jawaban dan pembahasan disertakan di dalam buku ini. Plusnya lagi, Anda akan mendapat CD CAT untuk memudahkan saat mengerjakan tes yang sebenarnya. Lengkap, bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Segera ambil buku ini dan berlatihlah terus hingga pelaksanaan ujian. Selamat dan sukses!!!